

ABSTRAK

Kamila Aprilia : Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021.

Pajak daerah merupakan salah satu potensi yang besar dalam pendapatan asli daerah, termasuk salah satu pajak yang potensial adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kota Bandung merupakan kota berkembang yang didatangi oleh masyarakat dari luar daerah untuk berwisata, bekerja, atau untuk melanjutkan pendidikan di universitas-universitas di kota tersebut. Fakta tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan perumahan di kota Bandung. Hal ini terlihat dari maraknya pembangunan perumahan dan industri terkait di Bandung. Jual beli bangunan dan tanah diperkirakan meningkat seiring dengan perkembangan perumahan dan perusahaan terkait. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021 tidak mencapai target. Maka dalam hal ini perlu dilakukan sebuah tindakan, yakni memaksimalkan pemungutan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pendapatan asli daerah Kota Bandung, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada Badan pendapatan daerah Kota Bandung, dan mengetahui peran Badan pendapatan daerah Kota Bandung dalam menertibkan wajib pajak yang tidak jujur dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemungutan pajak dari Oyok Abuyamin (2012: 4-8) yang didalamnya terdapat empat asas-prinsip pemungutan pajak, yaitu: (1)Asas Keadilan, (2)Asas Yuridis, (3)Asas Ekonomis, dan (4)Asas Finansial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku namun sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih berupaya dalam memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak BPHTB. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak BPHTB pada Badan pendapatan daerah Kota Bandung antara lain: (1) Masih terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan nilai transaksi sebenarnya; (2) Masih terdapatnya wajib pajak Apartemen yang masih menunda penyelesaian Akta Jual Beli; dan (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam menertibkan wajib pajak yang tidak jujur adalah dengan bekerja sama dengan *stakeholder*, membuat pernyataan transaksi penjual dan pembeli diatas meterai, melakukan pengecekan lapangan dan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pajak, Pemungutan Pajak, BPHTB

ABSTRACT

Kamila Aprilia : Collection of Tax on Acquisition Duty of Right on Land and Building at the Regional Revenue Agency for the City of Bandung in 2019-2021.

Local taxes are one of the big potentials in local revenue, including one of the potential taxes is the tax on the acquisition of land and building rights. The city of Bandung is a developing city that is visited by people from outside the area to travel, work, or to continue their education at universities in the city. This fact has an impact on increasing demand for housing in the city of Bandung. This can be seen from the rampant development of housing and related industries in Bandung. The sale and purchase of buildings and land is expected to increase in line with the development of housing and related companies. However, in reality BPHTB tax revenue at the Regional Revenue Agency for the City of Bandung for 2019-2021 did not reach the target. So in this case it is necessary to take an action, namely maximizing the collection of tax.

This research aims to determine the implementation of tax collection on the acquisition of land and building rights in the original regional income of the City of Bandung, the obstacles encountered in maximizing the implementation of tax collection of land and building rights acquisition fees in the Regional Revenue Agency of the City of Bandung, and knowing the role of the Bandung City regional revenue agency in disciplining taxpayers who are dishonest in calculating and reporting their taxes.

The theory used in this study is the theory of tax collection from Oyok Abuyamin (2012: 4-8) in which there are four principles of tax collection, namely: (1) The principle of justice, (2) Juridical principle, (3) Economic principle, and (4) Financial Principles. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the collection has been carried out in accordance with the applicable procedures, but until now the Regional Revenue Agency for the City of Bandung is still trying to maximize the achievement of the BPHTB tax revenue target. The obstacles faced in collecting BPHTB taxes at the Regional Revenue Agency for the City of Bandung include: (1) There are still taxpayers who do not convey the actual transaction value; (2) There are still apartment taxpayers who are still delaying the completion of the sale and purchase deed; and (3) Lack of public awareness in paying taxes. The role of the Regional Revenue Agency for the City of Bandung in disciplining dishonest taxpayers is to cooperate with *stakeholder*, making statements of seller and buyer transactions on stamp duty, conducting field checks and conducting outreach and appeals to the public.

Keywords : Tax, Tax Collection, BPHTB